

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Alasan Pemilihan Judul**

Middle East atau Timur Tengah merupakan salah satu kawasan yang cukup menarik untuk dikaji dalam Ilmu Hubungan Internasional. Karena percaturan politik di Timur Tengah selalu saja dinamis dan berkembang setiap saat. Timur Tengah mempunyai posisi geografik yang strategis dan unik. Timur Tengah merupakan kawasan yang kaya raya akan kandungan alamnya, terutama minyak yang merupakan kebutuhan vital bagi keberlangsungan hidup umat manusia.

Selain memiliki kawasan yang strategis, Timur Tengah juga merupakan kawasan yang rawan akan konflik, baik itu konflik antar negara di kawasan Timur Tengah itu sendiri maupun konflik yang melibatkan negara-negara lain terutama negara Barat yang notabennya merupakan negara kapitalis yang selalu mempunyai kepentingan pribadi di kawasan Timur Tengah. Salah satu faktor yang menyebabkan kawasan Timur Tengah menjadi kawasan yang rawan akan konflik adalah keanekaragamannya, seperti keanekaragaman ekonomi, geografis, ideologi, hidropolitik, serta keanekaragaman akan sukunya.

Jika di lihat keberadaan etnis dalam satu negara, etnis merupakan salah satu elemen penting dalam sebuah negara karena kestabilan politik, ekonomi, sosial dan budaya dalam suatu negara di tentukan oleh kestabilan etnis-etnis dalam negara tersebut. Jika kehidupan etnis dalam suatu negara berjalan stabil dan

memungkinkan untuk tidak terjadinya konflik, maka kestabilan dalam suatu negara akan terjamin pula. Selain itu, etnis juga yang membedakan budaya dalam satu negara dengan negara yang lain, karena etnis muncullah budaya yang merupakan ciri khusus dalam satu negara yang membedakan budaya dalam suatu negara dengan budaya di negara lain.

Masalah etnisitas merupakan salah satu topik permasalahan yang senantiasa dialami oleh berbagai negara-negara di dunia. Dalam hal ini Irak pun sebagai sebuah negara yang penduduknya mempunyai latar belakang etnis, suku dan budaya yang beranekaragam juga tidak terlepas dari masalah tersebut. Masalah etnis yang dihadapi Irak adalah mengenai keberadaan etnis Kurdi di Irak.

Irak, merupakan salah satu negara yang terletak di Timur Tengah. Dimana Irak juga memiliki keanekaragaman, salah satunya adalah keanekaragaman akan sukunya. Salah satu suku yang terdapat di Irak adalah Kurdi. Sebagai kelompok etnis minoritas terbesar di Irak, suku Kurdi menguasai hampir seperlima wilayah di Irak. Etnis Kurdi memiliki cita-cita untuk mewujudkan sebuah negara Kurdistan merdeka. Namun dalam sejarahnya, etnis Kurdi belum pernah memiliki sebuah tanah air yang merdeka. Berdasarkan atas kenyataan tersebut, dalam beberapa tahun terakhir, bangsa Kurdi tidak lagi mencita-citakan berdirinya sebuah negara Kurdistan yang merdeka. Cita-cita etnis Kurdi sekarang ini adalah mempunyai sebuah wilayah Kurdistan yang otonom, tempat etnis Kurdi mengatur rumah tangga mereka sendiri serta mempertahankan identitas dan sistem moral budaya etnis Kurdi sendiri.

Untuk itu penulis memutuskan untuk menulis skripsi tentang “KETERLIBATAN ETNIS KURDI DALAM PEMILU 2005 DI IRAK” sebagai judul skripsi yang akan diteliti.

## **B. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian skripsi ini yaitu :

1. Untuk mengetahui mengapa etnis Kurdi ikut melibatkan diri dalam pemilu 2005 di Irak.
2. Sebagai sarana pendalaman terhadap ilmu pengetahuan yang selama ini concern mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional.
3. Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar kesarjanaan Strata (S1) pada jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

## **C. Latar Belakang Masalah**

Irak merupakan salah satu negara yang terletak di sebelah Barat Asia dan terletak pada daerah yang subur. Di sebelah Utara Irak berbatasan dengan Turki, sebelah Timur berbatasan dengan Iran, sebelah Barat berbatasan dengan Syria dan Jordan, dan di sebelah Selatan berbatasan dengan Saudi Arabia dan Kuwait. Luas wilayah Irak adalah 167,975 mil (435,052 kilometer). Irak memiliki 2 pelabuhan utama yaitu Umm Qasr dan Basra yang menjorok ke dalam di antara Sungai Eufrat dan Tigris. Sebagian besar rakyat Irak mendiami dataran rendah yang subur, yang terletak diantara Basra, Baghdad, sungai Eufrat dan Tigris. Diantara

Mosul dan Kirkuk yang terletak di Utara, terdapat dataran tinggi dan pegunungan yang curah hujannya cukup untuk mendukung pertanian. Dan sumur minyak yang paling besar dan paling produktif terletak di daerah ini.

Komposisi penduduk Irak mencakup suku Kurdi yang mencapai sekitar 14 persen dan tersebar di sebelah utara dan di dekat sumur minyak di dekat Kirkuk. Meskipun etnis Kurdi sudah menganut agama Islam, tetapi etnis Kurdi tetap mempertahankan identitas etnisnya. Selain etnis Kurdi, di Irak juga terdapat minoritas lainnya, yaitu orang-orang Turki, Iran, Turkoman dan Assyiriah serta penganut agama Yahudi serta aliran keagamaan lainnya yang bertempat tinggal tersebar diseluruh negara atau terpusat di kota-kota. Agama yang dianut oleh sebagian besar penduduk, yaitu sekitar 81 persen menganut agama Islam aliran Sunni dan Syiah. Penduduk Irak yang menganut aliran Islam Sunni mencapai 21 persen dari jumlah penduduk Irak yang bertempat tinggal di bagian barat laut Irak. Sedangkan penduduk Irak penganut aliran Islam Syiah mencapai 60 persen dari populasi penduduk Irak yang terkonsentrasi di sebelah selatan di dekat Basra.<sup>1</sup>

Irak secara sosialis dan politis, adalah negara yang kompleks. Diperkirakan penduduk Irak berjumlah 24 juta jiwa dengan pertumbuhan penduduk sebesar 3 persen. Baghdad sebagai kota terbesar dan ibukota negara berpenduduk 4 juta disusul oleh Basra dan Mosul. Secara umum, komposisi penduduk Irak terdiri dari beberapa kelompok etnis. Dua terbesar adalah Arab Syiah (60 persen) yang bermukim di Selatan, etnis Arab Sunni (17 persen) di Tengah, dan etnis Kurdi yang bermazhab Sunni (23 persen) di Utara.

---

<sup>1</sup> Harwanto Dahlan, *Politik dan Pemerintahan Timur Tengah*, Diktat Kuliah Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. hal. 118

Etnis Kurdi merupakan etnis minoritas terbesar yang menguasai hampir seperlima wilayah Irak. Etnis Kurdi mempunyai cita-cita untuk mewujudkan sebuah negara Kurdistan. Merdeka, itulah impian dan cita-cita dari etnis Kurdi. Keinginan untuk merdeka, lepas dari kekuasaan Baghdad sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan etnis Kurdi. Merdeka dan berdaulat penuh sebagai bangsa adalah tujuan perjuangan etnis Kurdi selama berpuluh-puluh tahun.

Suku Kurdi sebagai bagian dari rakyat Irak minoritas, sering mendapatkan perlakuan diskriminasi dan juga sering mengalami penindasan selama pemerintahan Saddam Hussein. Selama perjuangan menuntut kemerdekaan yang meletus menjadi perang, etnis Kurdi selalu menemukan jalan buntu. Hingga perjuangan bersenjata berubah menjadi perjuangan politik dan diplomasi pada tahun 1955, tetap saja etnis Kurdi menjadi sasaran kekejaman.

Di mata dunia, etnis Kurdi merupakan potret etnis yang malang. Sedihnya lagi kepentingan etnis Kurdi sering diabaikan oleh pemerintah Irak, khususnya pada masa pemerintahan Saddam Hussein. Akibatnya mudah ditebak, etnis Kurdi ingin memisahkan diri dari negara Irak lalu mendirikan negara Kurdi. Tentu saja keinginan tersebut dinilai sebagai gerakan separatisme, segera ditentang oleh pemerintah Irak. Bahkan tidak hanya ditentang, tetapi juga ditumpas. Itulah yang menyebabkan Saddam Hussein membumihanguskan kawasan Utara yang didiami oleh etnis Kurdi, karena mereka dianggap sebagai separatisme yang dapat mengancam kesatuan Irak.

Pasca kemerdekaan Irak tahun 1932, bangsa Kurdi semakin terisolasi dan terpecah-pecah. Etnis Kurdi yang mendiami daerah-daerah perbatasan ini selalu

menjadi korban pertikaian antara Irak, Iran, dan Turki. Karena frustrasi atas semakin tertutupnya peluang menuju kemerdekaan, muncullah kelompok-kelompok militan Kurdi yang kerap melancarkan aksi-aksi terorisme.

Pada tahun 1960-an hingga 1970-an pemerintah Irak berkali-kali berusaha memindahkan orang-orang Arab ke utara Irak yang merupakan tempat etnis Kurdi tinggal. Hal ini dimaksudkan untuk menghilangkan pengaruh etnis Kurdi. Salah satu bentuk dari kekejaman Saddam Hussein terhadap etnis Kurdi yaitu tragedi “Jum’at Berdarah”. Dimana tragedi ini merupakan tindakan tegas dari Saddam Hussein terhadap etnis Kurdi yang berkhianat ketika terjadi Perang Teluk I antara Irak-Iran yang meletus pada tahun 1980-1988. Pengkhianatan etnis Kurdi ini membuat geram Saddam Hussein, sehingga Saddam Hussein tidak segan-segan menggunakan senjata kimia untuk menghabisi etnis Kurdi yang membangkang terhadap pemerintahannya. Dalam peristiwa tersebut ribuan etnis Kurdi tewas secara mengerikan, dan sekitar 100.000-150.000 etnis Kurdi lainnya mengungsi ke Turki dan Iran.<sup>2</sup> Dan menurut Saddam Hussein serangan ini dianggap wajar, menurutnya etnis Kurdi merupakan pengkhianat karena telah membantu tentara Iran dalam perang Irak-Iran.

Pemberontakan etnis Kurdi berikutnya terjadi setelah Perang Teluk usai yaitu perang antara Irak dengan Sekutu pimpinan Amerika pada tahun 1991, dimana pada saat itu kaum Arab Syiah di selatan Irak sedang mengangkat senjata melawan pemerintahan Saddam Hussein. Situasi ini dimanfaatkan oleh orang-orang Kurdi untuk mengangkat senjata melawan Baghdad. Dalam waktu tiga

---

<sup>2</sup> Trias Kuncayono, *Bulan Sabit Di atas Baghdad*, Penerbit Buku Kompas. (Jakarta, April 2005), hal : 165

pekan, semua wilayah Kurdi di Irak utara bergolak. Kota-kota seperti Ranya, Sulaymaniah, Erbil, Duhok, Aqra, dan Kirkuk dapat dikuasai oleh etnis Kurdi, termasuk provinsi Mosul. Untuk meredam aksi pemberontakan ini, Saddam Hussein mengirim Garda Republik dan dalam tempo seminggu wilayah-wilayah tersebut sudah dapat direbut kembali. Aksi Garda Republik ini membuat lebih dari satu juta etnis Kurdi mengungsi. Nasib baik berpihak kepada etnis Kurdi yang bergerak mengungsi ke perbatasan Iran. Sebaliknya, para pengungsi yang mencari perlindungan ke Turki harus menerima nasib yang kurang baik karena pemerintah Turki tidak mau menerima para pengungsi tersebut. Sehingga banyak dari para pengungsi terdampar di pegunungan-pegunungan dan banyak pula di antara para pengungsi tersebut meninggal. Hal ini merupakan pengulangan dari nasib buruk etnis Kurdi.<sup>3</sup>

Dari banyaknya rentetan cerita tentang tekanan yang dilakukan oleh Irak terhadap etnis Kurdi, tentu dengan mudah dapat ditebak bagaimana peran etnis Kurdi dalam perpolitikan di Irak. Tidak jauh berbeda dengan kondisi etnis Kurdi, partai-partai politik yang berbasis Kurdi sering kali mendapatkan hantaman keras dari Saddam.

Posisi etnis Kurdi dalam menjalankan politik Irak memang sangat kecil, bahkan pada masa Saddam Hussein tidak terasa geliatnya. Tetapi perannya dalam meramalkan kondisi dan situasi perpolitikan Irak sangat mengundang banyak perhatian kalangan Internasional. Mungkin karena keeksistensiannya untuk memberontak terhadap pemerintah Irak yang sangat konsisten dan berkala, dan

---

<sup>3</sup> Trias Kuncahyono, *Bulan Sabit Di atas Baghdad*, Penerbit Buku Kompas. (Jakarta, April 2005), hal : 175

juga tidak pernah padam, membuat etnis Kurdi menjadi sangat populer semenjak dahulu hingga sekarang.

Pada masa sebelum Saddam, etnis Kurdi sudah memiliki partai politik. Dan beberapa partai politik tersebut dengan gigih memperjuangkan nasib etnis Kurdi meskipun sering mendapatkan perlakuan tidak adil, namun gerakan mereka masih dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi atau disebut dengan “gerakan bawah tanah”. Pertama, Partai Demokratik Kurdistan (PDK), yang secara historis merupakan partai Kurdi utama di Irak utara. Partai ini didirikan oleh Mullah Mustafa Barzani di Teheran, Desember 1945, dan kini dipimpin oleh Mas’ud (Massaoud) Barzani. Tujuan utama partai ini adalah mendirikan negara merdeka Kurdistan. Kedua, Uni Patriotik Kurdistan (PUK) dibentuk pada bulan Maret 1975 sebagai kelompok oposisi Leninis terhadap kelompok Barzani dan kini dipimpin oleh Jalal Talabani.<sup>4</sup>

Pemerintah Irak juga sering mempermainkan emosi etnis Kurdi, terbukti dari peristiwa pada Maret 1970 pemerintah Irak menawarkan otonomi kepada etnis Kurdi dan gencatan senjata terjadi. Dalam penawaran tersebut pemerintah Irak tidak memasukkan Kirkuk sebagai bagian dari Kurdistan, tentu hal ini ditolak mentah-mentah oleh Barzani, pemimpin partai PDK. Karena bagi etnis Kurdi, Kirkuk tidak hanya memiliki nilai ekonomi dan kekayaan yang luar biasa tetapi diluar konteks “kekayaan minyak”, Kirkuk merupakan wilayah yang dianggap mereka sebagai kota bernilai history.

---

<sup>4</sup> “*Irak, AS dan PBB*”, (13 April 2003), diambil dari : [http://www.unisodem.org/kliping\\_detail.php](http://www.unisodem.org/kliping_detail.php)

Setelah Mustafa Barzani meninggal tahun 1979, Partai Demokratik Kurdistan di Irak mengalami kemerosotan dan digantikan oleh Jalal Talabani dari Uni Patriotik Kurdistan, yang merupakan penentang Barzani sejak tahun 1950. Pada tahun 1984, Irak menawarkan otonomi kepada Talabani dengan syarat tetap berposisi dengan Barzani. Namun tawaran tersebut ditolak, justru mereka membentuk aliansi PPK dan PDK-Irak atas jasa Iran.

Dua partai terbesar diantara 29 partai ini merupakan sebuah pencerahan atau sebagai awal mula lahirnya demokratisasi di tubuh etnis Kurdi. Walaupun pada masa sebelum Saddam Hussein memerintah Irak, etnis Kurdi tidak mendapatkan posisi apapun dalam pemerintahan Irak. Dapat dikatakan bahwa gerakan yang mereka lakukan masihlah kegiatan bawah tanah yang belum tersentuh dengan keabsahan atau legalitas yang terakui.

Namun setidaknya pada pra Saddam Hussein partai politik Kurdi sudah memiliki peran kecil di Dewan Komando Revolusi (RCC). Pada periode 1952-1963 komposisi dari 53 anggota Dewan Pimpinan Partai Ba'ath adalah 7,7% etnis Kurdi dan pada periode November 1963-1970, komposisi dari 53 anggota Dewan Pimpinan Partai Ba'ath adalah 7,5% Kurdi. Kemudian pada 1974 kelompok partai politik etnis Kurdi, diantaranya partai Kurdish Democratic Party (KDP). Namun pada tahun 1979, terjadi perselisihan paham serius mengenai kepemimpinan partai Ba'ath. Setidaknya pada Pra Saddam, etnis Kurdi mulai menapaki peran kecil dalam pemerintahan Irak.

Sedangkan pada masa pemerintahan Saddam Hussein 1980-2002, etnis Kurdi tidak mempunyai andil dalam pemerintahan di Irak. Jangankan etnis Kurdi,

para pemimpin partai Ba'ath yang Saddam anggap tidak mendukung semua kebijakan penuhnya, ditumbas dan tak segan-segan dipenjarakan oleh Saddam Hussein, kemudian tewas. Apalagi etnis Kurdi yang dianggap dapat mengancam kesatuan wilayahnya, terutama Kirkuk dan Mosul yang merupakan penghasil uang besar bagi Irak.

Tapi etnis Kurdi tidak lantas melemah, hal tersebut terbukti setelah Perang Teluk 1991 dengan bersatunya kembali UPK dan PDK-Irak dalam pemilu 1992, kedua partai ini meraih 50 kursi di pemerintahan regional Kurdistan dengan ibu kota Arbil (Erbil). Namun perseteruan terus terjadi. UPK menguasai wilayah Irak tengah dan tenggara. Setelah menduduki Arbil tahun 1994, UPK menyatakan menguasai separuh wilayah Kurdistan dan 70 persen penduduknya dibawah kekuasaannya.

Periode tahun 1991 hingga awal tahun 2003, merupakan periode yang penuh kesulitan bagi etnis Kurdi maupun Syiah. Selain dikarenakan penumpasan besar-besaran oleh rezim Saddam Hussein, mereka juga harus dihadapkan dengan masalah kelaparan yang berasal dari embargo ekonomi yang disahkan oleh Dewan Keamanan PBB terhadap rezim Saddam Hussein. Hal ini disebabkan karena Irak menginvasi Kuwait pada tahun 1990.<sup>5</sup>

Di satu sisi etnis Kurdi dapat bernapas sedikit lega, karena PBB mengeluarkan resolusi PBB No. 670 yang menegaskan bahwa di wilayah Utara dan Selatan menjadi “zona larangan terbang”. Zona tersebut ditetapkan guna

---

<sup>5</sup>[http://annisa.majelis.mujaahidin.or.id/berita/dunia/penderitaan\\_dan\\_harapan\\_umat\\_islam\\_irak.xhtm](http://annisa.majelis.mujaahidin.or.id/berita/dunia/penderitaan_dan_harapan_umat_islam_irak.xhtm)

melindungi orang-orang Kurdi dari serangan militer Saddam. Selain itu etnis Kurdi juga menikmati status otonomi khusus.

Pada masa kejayaan Saddam Hussein peran etnis Kurdi dalam politik sangat mendapatkan tekanan yang tajam. Tidak hanya tertekan secara batin tetapi juga secara lahiriah. Bagi partai-partai berbasis Kurdi selalu mendapatkan perlakuan buruk dan sering kali mendapat tuduhan sebagai gerakan separatisme oleh Saddam Hussein. Kawasan Kurdistan, di lembah Pegunungan Zagros, utara Irak, berbatasan dengan Turki dan Iran, tak pernah sepi dari serangan tentara Irak. Kota-kota Erbil, Mosul, Sulaymaniah, dan Kirkuk, berkali-kali dibombardir karena tuduhan separatisme yang dikobarkan oleh Uni Patriot Kurdistan pimpinan Jalal Talabani dan Partai Demokrasi Kurdistan pimpinan Masoud Barzani.

Selain itu, partai Kurdi tidak pernah mendapatkan posisi atau peran politik dalam parlemen di Irak pada masa pemerintahan Saddam Hussein. Pada masa pemerintahan Saddam Hussein, etnis Kurdi hanya dapat berpolitik dalam ruang lingkup yang terbatas yaitu hanya dapat mengaspirasikan politik mereka melalui pemilu di kawasan regional otonomi luas orang Kurdi di Irak utara. Saddam Hussein selalu berupaya untuk membujuk dua partai Kurdi ini untuk bergabung dengan pemerintah Baghdad namun dengan syarat tidak menuntut kemerdekaan lagi dan menguburkan impian mereka terhadap kembalinya Kirkuk kerangkulan etnis Kurdi. Hal ini memang tidak mungkin dapat diterima oleh etnis Kurdi, sehingga dapat dipastikan tawaran Saddam Hussein untuk bekerja sama justru berbalik menjadi konflik Kurdi dengan Saddam Hussein. Saddam yang sangat

memerangi keinginan orang Kurdi untuk memerdekakan diri di Irak utara, sering mengambil jalan-jalan kekerasan untuk mempertahankan kekuasaannya.

Politik marjinalisasi yang dilakukan oleh rezim Baghdad ini membuat etnis Kurdi semakin sulit memperjuangkan aspirasi mereka. Sehingga memaksa partai Kurdi khususnya UPK pimpinan Jalal Talabani kerap melakukan gerakan bawah tanah untuk melakukan perlawanan terhadap kebijakan Saddam Hussein di Irak khususnya Irak utara. Seperti pada keberpihakan etnis Kurdi terhadap Iran dalam Perang Teluk I dan II. Etnis Kurdi yang mempermudah akses keluar masuk pasukan Iran ke Baghdad melalui wilayah Kurdi di Irak utara, membuat Irak sangat kewalahan dengan aksi mereka.

Uni Patriotik Kurdistan (UPK) dan Partai Demokrasi Kurdistan (PDK) merupakan dua partai terbesar diantara 29 partai yang menyongsong Kurdi. PDK didirikan pada tahun 1946 oleh Mullah Mustafa Barzani, tujuan utama partai ini adalah mendirikan negara merdeka Kurdistan dan UPK didirikan pada bulan Maret 1975 sebagai kelompok oposisi Leninis terhadap kelompok Barzani, dan UPK lebih memperjuangkan dan menuntut sistem federal di Irak dan kini dipimpin oleh Jalal Talabani.<sup>6</sup> Namun diantara mereka sering kali terjadi perselisihan untuk memperebutkan wilayah kekuasaan di Kurdistan.

Kehadiran PDK-Irak diakui oleh pemerintah Baghdad setelah terjadi kudeta tahun 1958. Tahun 1970 PDK berdamai dengan Baghdad dengan imbalan diakui berkuasa di wilayah Kurdistan dan disertakan dalam pemerintahan di Baghdad. Namun banyak ketidaksepakatan yang terjadi antara PDK dan

---

<sup>6</sup> “*Bagaimanakah Saddam Menanggapi Kekalahan Irak?*”, (18 September 2007); diambil dari <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0304/13/Fokus/254197.htm>.

pemerintah Irak. Setelah Perang Teluk 1991, UPK kembali bersatu dengan PDK-Irak. Dalam pemilu 1992, kedua partai tersebut meraih 50 kursi di pemerintahan regional Kurdistan dengan ibu kota Arbil. Namun kedua koalisi ini kerap dirundung perseteruan.

Kedua partai politik tersebut menguasai sebagian besar wilayah di tiga provinsi wilayah utara, yakni Erbil, Duhok, dan Sulaymaniah. Wilayah tersebut mereka kuasai sejak tentara Baghdad menarik pasukannya. Kekosongan ini sangat dimanfaatkan oleh etnis Kurdi untuk merebut kembali kota tersebut, selain itu moment itu sangat tepat bagi etnis Kurdi karena bertepatan dengan pemberontakan kaum Syiah di selatan Irak yang merupakan kaum mayoritas di Irak namun mendapatkan tindakan diskriminasi oleh Saddam Hussein.

Lahirnya kedua partai dari Kurdi ini patut disyukuri oleh bangsa Kurdi di Irak utara, karena mereka memberikan harapan baru bagi terciptanya persatuan dan kesatuan Kurdi. Menunjukkan bahwa etnis Kurdi selangkah maju dari sebelumnya dan menuju arah perubahan yang lebih demokratis, yang merupakan cita-cita awal etnis Kurdi sendiri.

Dua tahun pasca jatuhnya rezim Saddam Hussein, rakyat Irak melangsungkan pemilihan umum, pada hari minggu 30 Januari 2005. Pada hari itu, pemilu yang demokratis dilaksanakan setelah lama dibawah pemerintahan yang otoriter. Dihari bersejarah itu rakyat Irak memilih 275 anggota Majelis Nasional, yang mana nantinya memiliki tugas utama untuk menyusun konstitusi baru dan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam pemilu 30 Januari ini, keikutsertaan etnis Kurdi diwakili oleh dua kelompok utama, yaitu Partai Demokrasi Kurdistan pimpinan Massoud Al-Barzani dan Persatuan Demokrasi Kurdistan pimpinan Jalal Talabani. Pelaksanaan pemilu ini merupakan suatu momen kebangkitan kelompok Kurdi yang selama pemerintahan Saddam Hussein merupakan kelompok yang selalu ditindas dan didalam pemerintahannya kelompok Kurdi tidak pernah diikutsertakan.

Kini, pemilu menjadi harapan bagi etnis Kurdi. Pemilu telah menempatkan etnis Kurdi sejajar dengan warga negara lain di Irak. Etnis Kurdi sejajar dengan orang-orang Arab Sunni dan Arab Syiah. Para pemimpin etnis Kurdi, misalnya Jalal Talabani dari Uni Patriotik Kurdistan dan Fay'iq Muhammad Ahmad Kubi dari Partai Solusi Demokratik Kurdistan, menyerukan agar semua orang Kurdi menggunakan hak mereka untuk memilih.

#### **D. Pokok Permasalahan**

Berdasarkan uraian situasi diatas, maka problematika yang dikemukakan adalah : “Mengapa dalam pemilu 2005 di Irak, etnis Kurdi ikut melibatkan diri dalam pemilu padahal pada tahun-tahun sebelumnya etnis Kurdi tidak pernah ikut dalam pemilu pemerintahan di Irak?”

#### **E. Kerangka Dasar Teori**

Kata “teori” berasal dari bahasa Yunani yang artinya “melihat” atau “memperhatikan”. Maka dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa teori adalah suatu pandangan atau persepsi tentang apa yang terjadi. Jadi berteori

adalah “pekerjaan penonton”, yaitu mendeskripsikan apa yang terjadi dan mungkin juga meramalkan kemungkinan berulangnya kejadian itu di masa depan.

Teori dapat didefinisikan sebagai suatu perangkat preposisi yang terintegrasi secara sintaksis, yaitu mengikuti aturan-aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis satu dengan lainnya dengan data dasar, sehingga dapat diamati. Selain itu teori merupakan konsep-konsep yang saling berhubungan menurut aturan logika menjadi suatu pernyataan tertentu sehingga dapat menjelaskan fenomena yang terjadi secara ilmiah.

Dari definisi diatas maka penulis menggunakan *Teori Partisipasi Politik dan Konsep Partai Politik* dengan tujuan agar dapat menggambarkan secara teoritis penulisan ini.

## **1. Teori Partisipasi Politik**

Pengertian Partisipasi Politik menurut Herbert McClosky yaitu kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum.<sup>7</sup>

Sedangkan menurut Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson, partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi

---

<sup>7</sup> Miriam Budiarjo, *Partisipasi dan Partai Politik*, PT Gramedi, Jakarta, 1981. hal. 1: Mengutip pendapat Herbert McClosky dalam bukunya: “*International Encyclopedia of the Social Sciences.*”

bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, secara damai dengan kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif.<sup>8</sup>

Dalam pengertian umum definisi dari partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara dan, secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*).<sup>9</sup>

Di negara-negara demokratis pemikiran yang mendasari konsep partisipasi politik ialah bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, yang melaksanakannya melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan-tujuan serta masa depan masyarakat itu dan untuk menentukan orang-orang yang akan memegang tampuk pimpinan untuk masa berikutnya. Jadi partisipasi politik merupakan suatu pengejawantahan dari penyelenggaraan kekuasaan politik yang abash oleh rakyat.

Anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam proses politik, misalnya melalui pemberian suara atau kegiatan lain terdorong oleh keyakinan bahwa melalui kegiatan tersebut kebutuhan dan kepentingan mereka akan tersalur atau sekurang-kurangnya diperhatikan dan bahwa mereka sedikit-banyak dapat mempengaruhi tindakan-tindakan dari mereka yang berwenang untuk membuat keputusan-keputusan yang mengikat. Dengan perkataan lain, mereka percaya bahwa kegiatan mereka mempunyai efek, dan ini dinamakan *political efficacy*.<sup>10</sup>

Di samping mereka yang ikut serta dalam satu atau lebih bentuk partisipasi, ada warga negara masyarakat yang sama sekali tidak melibatkan diri

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hal. 2: Mengutip pendapat Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson dalam bukunya.a: “*No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries.*”

<sup>9</sup> *Ibid.*, hal. 1

<sup>10</sup> *Ibid.*, hal. 3

dalam kegiatan politik. Hal ini merupakan kebalikan dari partisipasi dan disebut apati (*apathy*). McClosky berpendapat bahwa ada yang tidak ikut pemilihan karena sikap acuh tak acuh dan tidak tertarik oleh, atau kurang paham mengenai masalah politik. Ada juga karena tidak yakin bahwa usaha untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah akan berhasil dan ada juga yang sengaja tidak memanfaatkan kesempatan memilih karena kebetulan berada dalam lingkungan (mungkin lingkungan minoritas) di mana ketidak-ikutsertaan merupakan hal yang terpuji.<sup>11</sup>

Meskipun sebagian besar etnis Kurdi beraliran Sunni, akan tetapi dalam pemerintahan Irak, etnis Kurdi tidak memiliki tempat di pemerintahan. Selama rezim Saddam Hussein, etnis Kurdi merasa termarginalkan baik secara geografik maupun politik dalam negara Irak. Hal ini dikarenakan aspirasi politik etnis Kurdi yang bersifat provinsial, sehingga etnis Kurdi jarang sekali memperoleh akses pengaruh di pemerintahan.<sup>12</sup>

Sepanjang sejarah Irak, kelompok etnis Kurdi tidak pernah berkehendak untuk ikut ambil bagian dalam hidup kenegaraan Irak. Secara sporadis, selama tahun 1920-an, dan selama Perang Dunia II, etnis Kurdi terus berusaha untuk melepaskan diri dari pemerintahan Baghdad. Dari tahun 1961 hingga 1991, etnis Kurdi terus melancarkan pemberontakan. Cita-cita etnis Kurdi hanya satu yaitu lepas, bebas, dan merdeka dari kekuasaan Baghdad.

Pada tahun 1970, etnis Kurdi pernah berdamai dengan pemerintah Baghdad, dengan imbalan diakui berkuasa di wilayah Kurdistan dan

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, hal.4.

<sup>12</sup> Trias Kuncahyono, "Bulan Sabit di Atas Baghdad", *Kompas*, Jakarta, 2005, hal. 170.

diikutsertakan dalam pemerintah Irak. Akan tetapi, kedua hal tersebut tidak terlaksana.<sup>13</sup> Hal inilah yang membuat etnis Kurdi tidak percaya lagi dengan janji maupun pemerintahan Saddam Hussein.

Terlepas dari semua itu, yang pasti etnis Kurdi termarginalkan, baik secara geografik maupun politik di dalam negara Irak. Etnis Kurdi selalu mengidentifikasikan diri sebagai orang “Kurdi”, baru kemudian “Irak”, dan “bukan Arab”. Oleh karena identitas yang non-Arab dan aspirasi politik etnis Kurdi yang bersifat provinsial itulah, yang membuat etnis Kurdi jarang mendapat akses pengaruh.

Dengan runtuhnya rezim tirani yang selama ini dijalankan oleh Saddam Hussein telah membuat kelompok-kelompok masyarakat di Irak merasa ingin mendapatkan “potongan kue” kekuasaan yang selama ini terpusat pada partai Ba’ath pimpinan Saddam Hussein. Hal ini juga sebagai proses transisi demokrasi yang terjadi di Irak. Transisi demokrasi adalah tahap awal proses demokratisasi yang ditandai dengan peningkatan partisipasi publik, liberalisasi politik, peningkatan hak sipil, serta implementasi prosedur-prosedur demokrasi dalam ruang-ruang publik.

Sistem pemerintahan di Irak berubah dari sistem pemerintahan yang bersifat otoriter menjadi sistem pemerintahan yang lebih demokratis pasca invasi Amerika ke Irak. Dimana pada masa pemerintahan Saddam Hussein, nilai-nilai demokrasi yang ada menjadi bias sehingga kelompok-kelompok oposisi yang sebenarnya cukup banyak di Irak menjadi terkesampingkan.

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

Etnis Kurdi merupakan salah satu dari kelompok oposisi di Irak yang aspirasi politiknya terkesampingkan pada masa pemerintahan Saddam Hussein. Ketika rezim Saddam Hussein jatuh yang diakibatkan oleh invasi AS, etnis Kurdi akhirnya dapat menyalurkan aspirasi politiknya di Irak. Dimana hal ini diakibatkan oleh sistem demokrasi yang dibawa oleh AS, sehingga memberikan kesempatan bagi etnis Kurdi untuk dapat menyampaikan aspirasi mereka di pemerintahan.

Presiden AS, George W Bush dan PM Inggris Tony Blair memberikan pernyataan bahwa rakyat Irak sendirilah yang memerintah dan menentukan bentuk pemerintahan Irak pasca Saddam. Maka, etnis Kurdi seharusnya ikut berperan dalam menentukan bentuk pemerintahan Irak.

Keikutsertaan etnis Kurdi dalam pemilu di Irak mendapat dukungan luas dari negara-negara tetangga seperti Turki, Iran dan Suriah maupun AS. AS dan dunia Arab tidak menginginkan apabila etnis Kurdi meminta merdeka dari Irak. Apabila etnis Kurdi menuntut merdeka, hal ini tentunya sangat ditentang oleh negara-negara tetangga Irak, seperti Iran, Turki dan Suriah, dikhawatirkan akan menimbulkan potensi konflik di dalam negara mereka sendiri. Dimana ditakutkan akan memicu pemberontakan Kurdi di wilayah mereka. Dan tentunya hal ini tidak diinginkan oleh AS, yang mana hal tersebut menurut AS dapat merusak stabilitas politik internasional dan regional di Timur Tengah.

Pada pemilu 30 Januari 2005 ini, bagi kaum minoritas Kurdi merupakan kesempatan sejarah untuk meraih ambisi politiknya. Etnis Kurdi pun bersatu dan telah menyusun paket kandidat, dengan nama Daftar Koalisi Kurdistan untuk

pemilu parlemen Irak. Dua pemimpin karismatis Kurdistan, Talabani dan Barzani, yang selama ini selalu berseteru, berhasil mencapai kompromi politik untuk kepentingan bersama kaum Kurdi. Disepakati bahwa, Talabani yang akan menjadi kandidat kaum Kurdi untuk Presiden Irak pasca pemilu. Pada akhir Desember 2004, Talabani menegaskan bahwa kaum Kurdi kali ini harus mendapat salah satu jabatan baik itu jabatan Presiden atau Perdana Menteri pasca pemilu nanti.

## 2. Konsep Partai Politik

Pengertian partai politik menurut Sigmund Neumann adalah sebagai berikut:

Partai Politik adalah organisasi artikulatif yang terdiri dari pelaku-pelaku politik yang aktif dalam masyarakat, yaitu mereka yang memusatkan perhatiannya pada pengendalian kekuasaan pemerintahan dan yang bersaing untuk memperoleh dukungan rakyat, dengan beberapa kelompok lain yang mempunyai pandangan yang berbeda-beda. Dengan demikian partai politik merupakan perantara yang besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi-ideologi sosial dengan lembaga-lembaga pemerintah yang resmi dan yang mengkaitkannya dengan aksi politik di dalam masyarakat politik yang lebih luas.<sup>14</sup>

Sedangkan menurut R.H. Soltau, partai politik adalah sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisir, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik yang dengan memanfaatkan kekuasaannya yang bertujuan untuk menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka.<sup>15</sup>

Dalam pengertian modern, partai politik dapat di definisikan sebagai suatu kelompok yang mengajukan calon-calon bagi jabatan publik untuk dipilih oleh

---

<sup>14</sup> Miriam Budiarto (ed). Partisipasi dan Partai Politik, PT Gramedia, Jakarta, 1981, hal 14; Mengutip pendapat Sigmund Neumann dalam bukunya : “*Modern Political Parties.*”

<sup>15</sup> Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia, Jakarta, 1977, hal. 161; mengutip pendapat R.H.Soltau.

rakyat sehingga dapat mengontrol atau mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintah. Partai politik juga dapat didefinisikan sebagai sekelompok orang-orang yang terorganisir dengan tujuan untuk memenangkan kekuasaan dalam pemerintahan, melalui pemilihan umum atau dengan cara yang lain.<sup>16</sup>

Jadi pada hakekatnya Partai Politik merupakan sekelompok warga negara yang sedikit banyak telah terorganisir, dimana anggota-anggotanya memiliki cita-cita, tujuan orientasi yang sama. Kelompok ini berusaha untuk merebut dukungan rakyat, sedangkan yang menjadi tujuannya adalah memperoleh dan mengendalikan kekuasaan politik atau pemerintahan dan kemudian berusaha untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaannya dengan menempatkan anggota-anggotanya di dalam jabatan politik atau pun pemerintahan. Mengenai cara yang dipergunakan partai politik agar dapat memperoleh kekuasaan tadi dan kemudian menduduki jabatan politik ataupun pemerintah dengan melalui cara yang konstitusional seperti ikut serta dalam pemilihan umum, maupun dengan cara yang inkonstitusional (jarang terjadi), seperti mengadakan pemberontakan.

Salah satu fungsi partai adalah untuk memenangkan suatu pemilihan. Ini berhubungan dengan kesempatan untuk menempatkan seseorang pada posisi tertentu, baik dalam lembaga perwakilan ataupun dalam kedudukan pemerintahan. Partai dapat memberikan saringan tentang orang-orang yang hendak dipilih itu, dengan jalan mencari calonnya yang tepat dari dalam ataupun dari luar partai. Jadi dalam hal pencalonan berlaku saringan, tetapi bukan mengenai pendapat melainkan mengenai orang. Saringan itu dilanjutkan dengan kebulatan sokongan

---

<sup>16</sup> Andrew Beywood, *Politics*, Macmilan Press LTD, London, 1997, p. 230.

oleh partai terhadap orang-orang yang dicalonkan tersebut. Tentu saja diharapkan orang yang bersangkutan mempunyai pendapat yang sama dengan partai sehingga ia dapat mewakili partai.<sup>17</sup>

Begitu banyak partai politik yang muncul sebagai penyambung lidah etnis Kurdi namun hanya dua partai besar Kurdi yang mendapatkan perhatian besar dari rakyat. Partai-partai besar Kurdi seperti Uni Patriotik Kurdistan (UPK) dan Partai Demokrasi Kurdistan (PDK) yang berdiri pada tahun 1946 oleh Mustafa Barzani, pastinya mereka akan saling bersaing dalam mencari dan mendapatkan kekuasaan di Irak walaupun mereka memiliki satu asal dan alasan yang sama, tetapi memiliki ideologi yang berbeda terhadap tujuan untuk mendapatkan posisi tertingginya di Irak.

Partisipasi politik merupakan salah satu fungsi dari partai politik, yang mana memiliki pengertian sebagai kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan umum dan dalam ikut menentukan pemimpin pemerintah.<sup>18</sup> Atas pernyataan langsung yang dinyatakan oleh Bush dan Tony Blair “bahwa rakyat Irak dapat menentukan nasib mereka sendiri”, pastinya didalam termasuk etnis Kurdi pula dapat berpartisipasi dalam membangun Irak yang baru yang diharapkan akan berjalan dengan demokratis.

Untuk mendapatkan kekuasaan dalam sebuah pemerintah maka partai politik yang ada di Irak termasuk PUK dan PDK juga partai politik lainnya ikut serta dalam pemilihan umum, berkampanye dan berlomba mencari perwakilan

---

<sup>17</sup> Deliar Noer, *Pengantar ke Pemikiran Politik*, CV. Rajawali, Jakarta, 1983, Hal 210.

<sup>18</sup> Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1992. hal : 72

atau calon terbaik partai politik mereka sehingga mendapatkna simpatik dari masyarakat dan akan berpengaruh pada jumlah suara yang diperoleh. Tentunya untuk mendapatkan kekuasaan, sebuah partai harus memenangkan suara terbanyak.

Kurdi adalah salah satu kelompok masyarakat di Irak yang memiliki organisasi politik yang sudah berakar jauh di dalam masyarakat Irak khususnya Irak bagian utara, memiliki cabang-cabang didaerah, memiliki ideologi pemersatu bangsa dan memiliki kegiatan secara bersinambung, juga ikut serta dalam pemilihan umum dan memiliki wakil di parlemen, dengan demikian Kurdi memiliki peran politik di Irak walaupun masih sangat kecil. Etnis Kurdi telah memiliki partai politik sejak sebelum era Saddam Hussein, namun keberadaan mereka pada masa Saddam Hussein mendapatkan banyak tekanan dan termarginalkan dalam posisi politik di Irak, selain tidak mendapatkan posisi dalam pemilu di Irak, mereka juga kerap dirundung tuduhan sebagai kelompok separatisme yang harus dibumihanguskan. Semua akhirnya berakhir pasca invasi AS ke Irak, etnis Kurdi mendapatkan banyak angin segar dan menunjukkan geliatnya dikancah perpolitikan di Irak. Mereka tampil sebagai kelompok yang siap menghadapi proses pendemokrasian di Irak yang telah dicitakan oleh seluruh rakyat Irak.

Pada masa pemerintahan Saddam Hussein, partai Ba'ath merupakan partai yang berkuasa, dimana partai ini di dominasi oleh kelompok Sunni. Secara etnis-religius, dapat dikatakan bahwa penduduk Arab penganut aliran Sunni merupakan minoritas bila dibandingkan dengan penganut aliran Syiah yang berjumlah

hampir 60 persen dari jumlah penduduk Irak. Tetapi walaupun minoritas, penduduk Irak penganut aliran Sunni mempunyai peran yang dominan dalam percaturan politik di Irak.

Berkuasanya partai Ba'ath secara terus menerus semenjak masa pemerintahan Ahmad Hasan al-Bakr sampai dengan pemerintahan Saddam Hussein, menunjukkan bahwa adanya partai dominan di Irak. Meskipun dalam konstitusi di Irak mensyaratkan adanya demokrasi dengan ciri multipartai, adanya pemilihan umum dan kekuasaan yang tidak tunggal, namun dalam kenyataannya tidak demikian karena presiden Irak tetap satu yaitu Saddam Hussein. Sentralisme kekuasaan tunggal di Irak telah menyampingkan kelompok-kelompok oposisi yang sebenarnya cukup banyak di Irak.

Dalam kehidupan perpolitikan, etnis Kurdi memiliki 29 partai. Dimana 2 partai terbesar di antara 29 partai tersebut adalah Partai Demokratik Kurdistan-Irak (PDK-Irak) dan Uni Patriotik Kurdistan (UPK). Dalam pemilu 2005 kemarin, kedua partai tersebut bergabung dalam nama Aliansi Patriotik Demokrasi Kurdistan.

Akhirnya dalam pemilu 2005 yang lalu di Irak, Aliansi Patriotik Demokrasi Kurdistan meraih 75 kursi dari 275 kursi yang diperebutkan. Dimana kelompok Syiah memenangkan pemilu dengan mengantongi 148 kursi, yang secara otomatis jabatan eksekutif Perdana Menteri jatuh ke tangan Syiah. Sedangkan etnis Kurdi otomatis menduduki kursi Presiden.

Dengan jatuhnya kursi Kepresidenan ke tangan etnis Kurdi, membuktikan bahwa selama berpuluh-puluh tahun akhirnya etnis Kurdi dapat ikut serta dalam

menentukan masa depan bangsa dan rakyat Irak, meskipun harus direbut dengan susah payah yaitu dengan menjatuhkan rezim Saddam Hussein terlebih dahulu dengan invasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Tanpa adanya demokrasi yang demokratis di Irak mungkin akan sulit bagi etnis Kurdi untuk dapat ikut dalam pemilu di Irak.

#### **F. Hipotesa**

Dari kerangka teori di atas, maka penulis memulai penelitian dengan hipotesis sementara bahwa, keikutsertaan etnis Kurdi dalam pemilu di Irak terdiri atas beberapa faktor yaitu :

1. Visibilitas etnis Kurdi sebagai partai politik di Irak yang telah cukup lama hadir dalam pemerintahan di Irak.
2. Adanya perubahan sistem pemerintahan di Irak yang dibawa oleh AS pasca invasinya ke Irak.

#### **G. Metode Penelitian**

Teknik yang dipergunakan penulis dalam pengumpulan data-data untuk kepentingan penelitian adalah dengan cara studi pustaka, data sekunder yang diperoleh melalui literature-literatur, internet, serta sumber-sumber lain yang relevan yang mana dapat dijadikan sebagai acuan dan dapat membantu mengkaji masalah yang akan diteliti.

## **H. Jangkauan Penelitian**

Untuk memudahkan penelitian, maka penulis membatasi waktu penelitian yaitu dimulai dari invasi Amerika Serikat tahun 2003 ke Irak yang merupakan salah satu penyebab jatuhnya rezim Saddam Hussein sampai dengan pemilu 2005 di Irak yang diikuti oleh etnis Kurdi. Namun, tidak menutup kemungkinan terhadap peristiwa-peristiwa yang masih relevan, meskipun terjadi diluar tahun tersebut.

## **I. Sistematika Penulisan**

Guna mempermudah pembahasan, penulisan serta pemahaman terhadap pemikiran yang ingin dituangkan dalam tulisan ini, maka penulis membuat sistematika penulisan yang di bagi menjadi 5, yaitu :

**BAB I.** Berupa Pendahuluan, yang terdiri dari; Alasan Pemilihan Judul, Tujuan Penelitian, Latar Belakang Masalah, Pokok Permasalahan, Kerangka Dasar Teori, Hipotesa, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

**BAB II.** Membahas tentang sejarah politik etnis Kurdi, yang berisi tentang jatidiri etnis Kurdi yang mencakup asal-muasal etnis Kurdi dan masa kejayaan etnis Kurdi, dan Keterlibatan etnis Kurdi pada masa pemerintahan Saddam Hussein.

**BAB III.** Membahas tentang perubahan keterlibatan politik etnis Kurdi, yang berisi tentang keterlibatan etnis Kurdi dalam politik pasca Saddam

Hussein, proses pemilu di Irak pada tahun 2005, dan keterlibatan etnis Kurdi dalam pemilu di Irak tahun 2005.

**BAB IV.** Membahas faktor-faktor yang menyebabkan etnis Kurdi ikut melibatkan diri dalam pemilu 2005 di Irak. Dalam bab ini dijelaskan faktor-faktor penyebab keikutsertaan etnis Kurdi dalam pemilu dimana etnis Kurdi sebagai partai politik di Irak dan adanya perubahan sistem pemerintahan di Irak yang tidak lepas dari peran AS.

**BAB V.** Kesimpulan. Berisi mengenai apa yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya.